|  |
| --- |
| eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2019, 7(1): 043-054  ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id  © Copyright 2019 |

**ANEKSASI RUSIA TERHADAP KRIMEA TAHUN 2014**

**Irvand Sahir[[1]](#footnote-2)**

**NIM.1302045089**

***Abstract***

*Crimea is a city in Ukraine which is the center of pro-Russian sentiment in the country. The region is on the Black Sea Peninsula and has around 2.4 million people, mostly from Russian and Russian-speaking. The purpose of this reaseacrh is to explain the reason Russia annexed Crimea in 2014. The research method usesexplanative research type with data sources obtained from books, journals, websites and news valid. In this research the author uses concept of National Interest andAnnexation (perspective of international law). The results of this study indicate that the annexation by Russia to the Crimea is to achieve its national interests, some of Russia's national interests, among others, the interests of protecting territorial integrity, cultural interests, military interests, and economic interests.However, the annexation that Russia has done got criticism from Ukraine and the international world, the United Nation, the European Union, and the United Stated.*

***Keywords:****Annexation, National Interest,Russia, Crimea, Ukraine*

**Pendahuluan**

Krimea merupakan sebuah kota di Ukraina yang menjadi pusat sentimen pro Rusia di negara itu. Wilayah ini berada di Semenanjung Laut Hitam dan memiliki sekita 2,4 juta penduduk yang sebagian besar berasal dari etnis Rusia dan Perbahasa Rusia (http://www.lasdipo.co, diakses pada 23 Januari 2017). Rusia telah menjadi kekuatan dominan di Krimea sejak menguasai wilayah tersebut tahun 1783, meski akhirnya menjadi milik Ukraina sejak pecahnya Uni Soviet. Jarak antara Krimea dengan Rusia adalah 889 Mil atau 1419 Km jalur darat sedangkan jalur udara adalah 763 Mil atau 1228 Km, dimana bila ditempuh dengan mobil membutuhkan waktu 17 jam 17 menit, sedangkan apabila ditempuh dengan pesawat hanya 2 jam 8 menit(http://www.distancebetweencities.net, diakses pada 23 Januari 2017).

Krimea menjadi bagian dari Ukraina sejak 1954 pada saat Uni Soviet dipimpin oleh Nikita Khrushchev, Khrushchev memberikan wilayah ini pada Ukrania dengan alasan karena keadaan ekonomi masyarakat, kedekatan wilayah, serta hubungan budaya dan ekonomi yang erat, dan Krimea masuk ke wilayah Ukraina berdasarkan alasan utamanya untuk mempermudah pasokan air ke semenanjung tersebut. Sejak saat itu, Krimea menjadi wilayah semi-otonom dari negara Ukraina yang memiliki ikatan politik kuat dengan Ukraina, namun memiliki ikatan budaya yang kuat dengan Rusia.

Pada saat kepemimpinan Victor Yanukovych di tahun 2014, Yanukovych memutuskan untuk tidak menandatangani pakta kerjasama ekonomi yang ditawarkan oleh Uni Eropa, dan sebaliknya melakukan kerjasama dengan Rusia. Akan tetapi, perbuatan yang telah dilakukan oleh Victor Yanukovych yang menolak kerjasama dengan negara-negara di Eropa tersebut, menyebabkan masyarakat Kiev di Ukraina (*Euromaidant)* turun melakukan aksi protes dan demo sehingga dia dijatuhkan dari pemerintahannya.

Tindakan Rusia ini memperburuk krisis Ukraina yang sudah terjadi. Selain itu, tindakan Rusia ini juga menyulut terjadinya krisis Krimea, Rusia bahkan ingin mengembalikan Krimea menjadi bagian dari Rusia, dimana Krimea membuktikan dengan menggelar referendum pada tanggal 16 Maret 2014.

Parlemen Krimea memutuskan untuk melakukan referendum. Mosi yang diajukan oleh pemerintah kepada masyarakat adalah bersedia atau tidak masyarakat Krimea untuk bergabung dengan Rusia atau tetap menjadi bagian dari kedaulatan Ukraina. Sekitar 1,5 juta masyarakat Krimea melakukan referendum dan memberikan suaranya di 27 tempat pemungutan suara yang telah disediakan oleh komisi pemilihan umum Krimea mulai pukul 08.00 sampai 20.00 waktu setempat (https://dunia.tempo.co, diakses pada 15 April 2018). Hasil resmi menunjukkan sebanyak 96,6% masyarakat Krimea memilih untuk bergabung dengan Rusia dan sebanyak 3,4% memilih untuk tetap dengan Ukraina . Hal tersebut tidak serta merta dapat dijadikan pembenaran keberadaan militer Rusia di Krimea. Menurut pandangan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat (AS), pengiriman pasukan militer Rusia ke Krimea tersebut adalah tindakan aneksasi. Karena di dalam Resolusi Majelis Umum PBB No.2625 tahun 1970, negara-negara dilarang menggunakan ancaman serta kekerasan dengan menggunakan militer.

Meskipun Rusia sendiri beranggapan bahwa tindakannya tersebut bukanlah aneksasi melainkan tanggung jawab atas keselamatan dan untuk melindungi etnis Rusia yang berdomisili di Krimea, setelah adanya referendum. Akan tetapi AS menganggap aneksasi yang di lakukan oleh Rusia melanggar hukum internasional dan kedaulatan Ukraina.

**Kerangka Dasar Teori dan Konsep**

***Teori kepentingan internasional***

Kepentingan nasional merupakan serangkaian tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara yang sesuai dengan kebutuhan bangsa/negara dan sehubungan dengan hal yang dicita-citakan oleh bangsa/negara tersebut. Kepentingan nasional relatif tetap dan sama diantara semua negara yaitu kepentingan atas keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Menurut Mohtar Mas’oed, kepentingan nasional sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara dan sebagai pengukur keberhasilan suatu politik luar negeri, yaitu untuk evaluasi.

Menurut Thomas Robinson, kepentingan nasional terdiri dari 6 macam:

1. *Primary Interest* (Kepentingan Primer)yang meliputi perlindungan bangsa secara fisik negara, politik, identitas budaya dan kelangsungan hidup bangsanya terhadap gangguan dari luar. Kepentingan ini adalah suatu hal yang mutlak dan semua bangsa memiliki kepentingan ini.
2. *Secondary Interest* (Kepentingan Sekunder)adalah kepentingan yang tidak termasuk ke dalam *primary interest* namun kepentingan ini memberikan kontribusi terhadap *primary interest.*
3. *Permanent Interest* (Kepentingan Permanen)adalah kepentingan yang relatif tetap dan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Kepentingan ini berubah seiring dengan berjalannya waktu, namun perubahan tersebut hanya berjalan dengan lambat.
4. *Variable Interest* (Kepentingan Tidak Tetap)adalah kepentingan-kepentingan yang merupakan fungsi dari keseluruhan kepribadian, opini publik, kepentingan setempat, partisipan politik, norma politik dan moral yang telah ada pada suatu bangsa/negara. Dengan kata lain, kepentingan ini adalah apa yang telah ada pada bangsa/negara tersebut yang pada suatu waktu dipilih untuk dijadikan sebagai salah satu kepentingan nasionalnya, dan bisa dibedakan dari kepentingan yang bersifat primer dan permanen.
5. *General Interest* (Kepentingan Umum) yakni kepentingan-kepentingan yang bisa diselenggarakan untuk wilayah geografis yang luas, jumlah bangsa yang besar atau untuk beberapa hal yang spesifik, misalnya ekonomi, perdagangan, diplomasi, hukum internasional dan sebagainya.
6. *Specific Interest* (Kepentingan Khusus)adalah kepentingan-kepentingan yang tidak termasuk dalam *general interest* dan biasanya kepentingan ini ditetapkan dalam batas waktu dan tempat serta seringkali merupakan perkembangan atau konsekuensi logis dari *general interest.*

***Teori Aneksasi (Dalam Perspektif Hukum Internasional)***

Dalam definisinya, aneksasi adalah pengambilan wilayah secara paksa wilayah negara lain untuk disatukan dengan wilayah negara sendiri. Aneksasi sendiri adalah turunan dari intervensi. Intervensi merupakan salah satu bentuk campur tangan dalam urusan negara lain yang bersifat diktatorial, mempunyai fungsi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional. Intervensi juga dapat diartikan sebagai turut campurnya sebuah negara dalam urusan dalam negeri negara lain dengan menggunakan kekuatan atau ancaman kekuatan, dalam hal ini kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan militer.

Hukum internasional mengartikan intervensi sebagai segala bentuk campur tangan negara asing dalam urusan satu negara, yaitu suatu campur tangan negara asing yang bersifat menekan dengan alat kekerasan (*force)* atau dengan ancaman melakukan kekerasan, apabila keinginannya tidak terpenuhi. Piagam PBB sendiri telah mengatur prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “organisasi ini (PBB) berdasarkan prinsip kesetaraan kedaulatan dari semua anggota.” Kemudian pasal 2 ayat (4) piagam PBB juga mengatur bahwa semua anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integeritas teritorial atau kemerdekaan politik negara manapun, atau dengan cara lain tidak konsisten dengan tujuan PBB.” Piagam tersebut dengan jelas menyatakan bahwa dalam hubungan antar negara tidak diperbolehkan adanya intervensi. Aneksasi muncul ketika intensitas konflik internal di sebuah negara meningkat dan dirasa bahwa negara tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah atau konflik internal yang terjadi. Aneksasi ini merupakan bagian dari intervensi politik yang umum terjadi di dunia, meskipun kemudian banyak negara yang mengatakan aneksasi dapat digunakan untuk tujuan-tujuan baik, namun menurut beberapa kesepakatan organisasi internasional aneksasi adalah bentuk dari intervensi yang tidak diizinkan.

Secara konseptual aneksasi dalam praktek umumnya berangkat dari dua kepentingan, yang pertama ialah perlindungan terhadap keutuhan wilayah, yang kedua ialah kepentingan-kepentingan lain yang ingin dituju. Biasanya adalah kepentingan strategis seperti penguasaan wilayah ekonomis atau penguasaan ladang ekonomi.

**Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian Penelitian ini menggunakan penelitian eksplanatif. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu menggunakan *library research*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu merangkum dan menganalisis data-data sekunder dari studi kepustakaan yang kemudian disajikan dalam hasil penelitian.

**Hasil Penelitian**

***Krimea***

Krimea terletak di pantai utara Laut Hitam dan di pantai barat Laut Azov yang berbatasan dengan wilayah Ukraina bagian utara. Total luas wilayah Krimea adalah 26.100 km² (10,77 mil²). Letak geografi Krimea berada di 45,3ºLU 34,4ºBT dan titik tertingginya berada di 1.545 m (5.065 ft). Beberapa kota di utama yang ada di Krimea adalah Feodosia, Kereh, Sevastopol, Sudak, Yalta, dan Yevpatoria.

Kondisi tografi Krimea relatif datar karena sebagian besar semenanjung ini terdiri dari padang rumput semi kering atau padang rumput semi tanah. Pegunungan Krimea terletak di sepanjang pantai tenggara negara itu, kondisi Demografi Krimea tergolong unik, karena bahasa Ukraina adalah bahasa resmi di Krimea, akan tetapi bahasa sehari-hari yang umum digunakan oleh masyarakat di Krimea adalah bahasa Rusia. Selain bahasa tersebut, ada bahasa lain yang tersebar di Krimea yaitu bahasa Krimtartars yang termasuk ke dalam kelompok bahasa Turki. Menurut sensus tahun 2001 bahasa-bahasa yang digunakan adalah Russia (77%), Krimtartars (11,4%), dan Ukraina (10,1%).

Krimea yang menjadi wilayah semi-otonom Ukraina memiliki ikatan politik yang kuat dengan Ukraina, namun memiliki ikatan budaya yang kuat dengan Rusia. Badan legislatifnya antara lain Dewan Tertinggi Krimea beranggotakan 100 wakil rakyat, kekuasaan lembaga eksekutif dipegang oleh Dewan Menteri yang dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih atas persetujuan presiden Ukraina (https://www.antaranews.com, diakses pada 8 Maret 2018).

***Aneksasi Rusia atas Krimea***

Sejak tanggal 24 Februari 2014 Krimea menjadi wilayah yang diperebutkan antara Ukraina dengan Rusia. Hal ini berawal dari krisis yang terjadi di Ukraina hingga krisis di Krimea yang menjadi dasar intervensi Rusia yang berakhir dengan aneksasi Rusia atas Krimea.Pada tahun 2013 Ukraina mengalami pergolakan, pada saat Ukraina di pimpin oleh Presiden Viktor Yanukovych. Pergolakan atau krisis yang dialami Ukraina ini diawali ketika Victor Yanukovych memutuskan untuk tidak menandatangani pakta kerjasama ekonomi yang ditawarkan oleh Uni Eropa, yaitu *Deep and Comprehensive Free Trade Agreement* (DCFTA) di Eastern Partnership Summit di Vilnus, Lituania pada tanggal 28-29 November 2013,dan sebaliknya melakukan kerjasama dengan Rusia.

Tujuan dari DCFTA tersebut adalah untuk menigkatkan perdagangan bilateral berupa barang dan jasa antara Ukraina dan Eropa dengan tarif yang lebih rendah dan untuk menyatukan aturan dagang untuk produk pertanian dan dalam sekotr industri (http://ec.europa.eu, diakses pada (3 Mei 2018).

Perbuatan Yanukovych yang menolak pakta kerjasama yang ditawarkan Uni Eropa tersebut, membuat masyarakat Ukraina pro eropa melakukan demo besar-besaran, demo tersebut terjadi pada tanggal 1 Desember 2013 di ibu kota Ukraina yaitu Kiev.Masyarakat Ukraina melakukan demo dikarenakan mereka menginginkan Ukraina lebih menjalin kerjasama dengan Eropa ketimbang Rusia. Parlemen Ukraina pun menanggapi demo besar-besaran yang dilakukan masyarakat pro Eropa tersebut, pada tanggal 22 Februari 2014 Victor Yanukovych diberhentikan sebagaia presiden Ukraina. Setelah memberhentikan Yanukovych, parlemen Ukraina kemudian mengangkat Oleksandr Turchynov yang merupakan ketua parlemen Ukraina menjadi presiden sementara

Krisis Ukraina ini menyulut terjadinya masalah pergolakan di Krimea, dimana masyarakat Krimea terutama yang beretnis Rusia merasa hilangnya jaminan kemanan mereka. Parlemen Krimea yang mendukung Rusia pun bertindak dengan mendeklarasikan kemerdekaan Krimea atas Ukraina pada tanggal 11 Maret 2014. Tanggal 16 Maret 2014, Parlemen Krimea memutuskan untuk melakukan referendum. Mosi yang diajukan pada saat referendum adalah bersedia atau tidak masyarakat Krimea untuk bergabung dengan Rusia atau tetap menjadi bagian dari Ukraina.

Hasil referendum menunjukkan bahwa sebanyak 96,6% masyarakat Krimea memilih untuk bergabung dengan Rusia dan sebanyak 30,4% memilih untuk tetap dengan Ukraina (http://internasional.kompas.com, diakses pada 5 November 2017). Dengan hasil referendum tersebut membuat presiden Rusia Vladimir Putin meminta parlemen Rusia menyetujui rencananya untuk segera mengirimkan pasukan militer secara formal ke perbatasan Krimea

Dengan situasi yang tidak kondusif di Ukraina membuat Rusia menyiagakan pasukan militernya di dekat perbatasan Rusia-Ukraina. Hal ini dilakukan Rusia dengan alasan melindungi etnisnya yang berada di Ukraina. Menurut pemerintah Ukraina, Rusia mengirimkan 1.500 pasukan militer di wilayah Crimea, 170 kendaraan militer, dan lebih dari 300 unit senjata berat yang dikerahkan untuk berperang melawan pasukan militer Ukraina (http://www.dw.com, diakses pada 9 Maret 2018).

Rusia menyiagakan 150 ribu pasukan yang terdiri dari angkatan darat dan angkatan udara yang melibatkan pasukan darat, para penerjun payung, dan divisi pertahanan udara Rusia di wilayah barat yang berbatasan dengan Ukraina. Tentara Rusia dilengkapi dengan peralatan tempur yang modern dan berat. Reaksi Rusia ini untuk merespon situasi yang sedang terjadi di Ukraina.

***Reaksi Ukraina dan Dunia Internasional***

Aneksasi Rusia melanggar beberapa ketentuan hukum internasional, yaitu: Pertama, Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB tentang penggunaan kekerasan (http://www.bbc.com, diakses pada 9 Maret 2018). Kedua, Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 Tahun 1970 tentang The Declaration On Principles Of International Law Concerning Friendly Relations And Co-Operation Among States. Ketiga, Resolusi Majelis Umum PBB No. 2131 Tahun 1965 tentang Declaration On Inadmissibility Of Intervention In The Domestic Affairs Of States And The Protection Of Their Independence And Sovereignty pada Pasal 1 dan Pasal 2 dan Resolusi Majelis Umum PBB No. 3314 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 1974 tentang agresi. Keempat, perjanjian bilateral antara Rusia dengan Ukraina seperti The Treaty on Friendship, Cooperation and Partnership between Russia and Ukraine yang ditandatangani pada tahun 1997, serta Memorandum Non Proliferasi senjata nuklir pada tanggal 5 Desember 1994 di Budapest.

Selain melanggar hukum internasional, aneksasi yang di lakukan Rusia terhadap Krimea ini menuai reaksi dari Ukraina dan beberapa negara di Eropa juga Amerika Serikat. Ukraina merupakan negara kecil yang tidak memiliki cukup kekuatan dalam melawan negara *great power* seperti Rusia. Oleh karena itu Ukraina dibawah kepemimpinan Oleksandr Turchynov menggunakan strategi untuk melawan Rusia.

Menurut pendapat John Lovell seorang anggota Dewan Umum Los Angeles, strategi merupakan serangkaian langkah-langkah atau keputusan yang dirancang sebelumnya dalam situasi kompetitif dimana hasil akhirnya tidak semata-mata bersifat untung-untungan.Dalam hal ini reaksi dari Ukraina yang menolak aneksasi dari Rusia yaitu dengan menyiagakan pasukan militernya untuk siap berperang, Ukraina memprotes tindakan Rusia tidak dengan menyerang balik Rusia.

Ukraina kembali memprotes tindakan aneksasi Rusia dengan meminta pertolongan kepada Dewan Keamanan PBB, Dewan Keamanan PBB menanggapi permintaan Ukraina untuk menolong mereka dalam krisis Ukraina dan Rusia dengan melakukan sidang. Dewan Keamanan PBB melakukan pemungutan suara dalam sidang tersebut yang bertujuan mengesahkan resolusi untuk mendesak negara-negara lain agar tidak mengakui hasil referendum Crimea pada tanggal 15 Maret 2014. Sebanyak 13 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB memberikan suara mendukung rancangan teks, namun Rusia menolak dan China memilih abstain (https://news.un.org, diakses pada 14 Maret 2018).

Dengan tidak setujunya Rusia yang merupakan negara yang memiliki hak veto, hasil untuk meresolusi tidak dapat diadopsi. Walau tidak dapat di adopsi, pada 27 Maret 2014 Majelis Umum PBB menyambut permintaan Ukriana dengan mengeluarkan Resolusi No.68/262. Resolusi tersebut berisikan mengenai integritas batas-batas wilayah Ukraina yang diakui secara internasional. Majelis Umum PBB menyerukan kepada semua negara dan organisasi internasional agar tidak mengakui hasil referendum yang dilakukan masyarakat Crimea pada 16 Maret 2014 karena tidak memiliki validitas.

Resolusi ini disetujui 100 negara, 58 negara menyatakan abstain, 11 negara menolak serta 24 negara tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara*.* Permintaan Ukraina untuk mendapat dukungan dari Dewan Keamanan PBB sia-sia, karena Rusia adalah salah satu anggota Dewan Keamanan PBB.

Selain sanksi dari PBB, Uni Eropa pun menjatuhi sanksi kepada Rusia. Dewan Uni Eropa memutuskan untuk membatasi akses Rusia ke pasar modal, pembatalan perdagangan senjata dan barang-barang yang digunakan untuk keperluan militer sekaligus sipil, *blacklist* perusahaan-perusahaan minyak dan gas raksasa, pelarangan visa serta pembekuan aset untuk individu dan entitas yang berhubungan dengan konflik serta dilarangnya kegiatan investasi di Rusia (http://www.dw.com, diakses pada 3 Mei 2018).

Amerika serikat pun mengiringi upaya langkah Uni Eropa dengan menetapkan sanksi serupa.Sanksi tersebut berupa pembekuan aset Rusia di Amerika, dan larangan pemberian visa bagi pejabat Rusia yang terlibat langsung dalam intervensi militer Rusia di Krimea (https://dunia.tempo.co/, diakses pada 3 Mei 2018). Selain itu Amerika Serikat juga meminta *Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE), Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa untuk mengirimkan misi pemantauan ke Ukraina.

***Latar Belakang Aneksasi Rusia Terhadap Krimea***

Walaupun Rusia telah menerima sanksi dari PBB, Uni Eropa, dan Amerika Serikat, akan tetapi Rusai tetap melakukan aneksasi di Krimea. Aneksasi tersebut di latar-belakangi oleh beberapa kepentingan Rusia di Krimea. Beberapa kepentingan tersebut adalah kepentingan melindungi keutuhan wilayah, kepentingan budaya, kepentingan militer dan kepentingan ekonomi.

1. Kepentingan Melindungi Keutuhan Wilayah

Dalam pengertiannya keutuhan wilayah adalah tetap atau tidak berkurang sesuai dengan aslinya atau tidak berubah dan tidak terbagi-bagi. Sedangkan keutuhan negara maksudnya bahwa negara memiliki wilayah yang tidak terbagi-bagi tetapi merupakan satu kesatuan yang bulat, baik daratan, lautan, maupun udara, dalam naungan satu negara. Dalam hal ini Krimea menjadi teritorial Rusia, dimana Rusia ingin menjaga atau melindungi Krimea.

Konsekuensi lain yang baik untuk Rusia ketika Krimea kembali menjadi wilayah kedaulatannya, luas wilayah Rusia akan bertambah bukan hanya dari luas daratannya saja, melainkan luas lautan dan udara Rusia juga bertambah. Luas wilayah Rusia awalnya 17.125.200 km² menjadi 17.152.200 km² setelah Krimea bergabung dengan Rusia. Hal ini tentunya sangat menguntungkan Rusia yang dapat memperluas wilayah kedaulatannya.

Selain keuntungan memperluas wilayahnya dan memperluas pengaruhnya terhadap negara-negara pecahan Uni Soviet, penggabungan wilayah Krimea ke Rusia juga dapat memberikan keuntungan lain. Rusia dapat mengawasi negara-negara tetangga yang berdekatan dengan wilayah Rusia dalam hal ini wilayah Krimea melalui Laut Hitam.

1. Kepentingan Budaya

Krimea merupakan wilayah yang dihuni sekitar 1,9 juta penduduk dengan mayoritas dihuni oleh masyarakat yang beretnis Rusia, etnis Rusia sebanyak 59 %, etnis Ukraina sebanyak 20 %, etnis Tartar Krimea sebanyak 15 %, dan sisanya etnis lainnya sebanyak 6 %. Kepentingan budaya dalam hal ini ialah sebagai identitas budaya Rusia.Dengan bergabungnya Krimea ke Rusia, jumlah populasi Rusia bertambah dan hal ini akan membuat kekuatan nasional Rusia bertambah. Kekuatan nasional dapat sangat berpengaruh bagi setiap negara, karena semakin banyak populasi di suatu negara, akan membuat kekuatan nasionalnya bertambah.

Krimea dan Rusia memiliki hubungan yang kuat dan komprehensif mulai dari politik, militer, ekonomi, hingga identitas. Krimea merupakan wilayah dengan persentase etnis Rusia terbesar (58%) dan juga penutur bahasa Rusia terbesar (77%) di Ukraina. Hubungan sejarah dan ikatan politik dan budaya yang kuat antara Krimea mempengaruhi pada kebijakan interventif Rusia terhadap Krimea. Sebagian besar rakyat dan anggota parlemen beserta pejabat eksekutif Krimea menginginkan Rusia sebagai fokus kebijakan luar negeri ketimbang Uni Eropa ataupun Amerika Serikat.

Setelah Victor Yanukovych presiden Ukraina yang pro terhadap Rusia dijatuhkan dari pemerintahannya oleh masyarakat *Euromaidant,* membuat masyarakat Krimea keturunan Rusia resah. Dengan keresahan yang mereka alami membuat mereka meminta kepada Rusia untuk mendapatkan jaminan keamanan, menjawab permintaan tersebut Rusia pun mengirimkan pasukan militer mereka ke Krimea (https://dunia.tempo.co, diakses pada 17 April 2018).

Dengan kondisi demografi yang mayoritas dihuni oleh masyarakat beretnis Rusia dijadikan Rusia sebagai alasan untuk membenarkan keberadaannya di Kriema, selain itu konflik internal yang terjadi di Ukraina dan adanya tuntutan dari masyarakat pro Rusia membuat situasi di Krimea menjadi tidak stabil. Rusia merasa berhak untuk mengintervensi konflik yang terjadi dengan alasan melindungi masyarakat Krimea yang beretnis Rusia, dan menganggap bahwa tindakannya tersebut dilakukan sebagai bentuk dari misi penyelamatan dunia.

1. Kepentingan Militer

Keamanan di kawasan Laut Hitam begitu kompleks karena mencakup berbagai konteks, baik keamanan militer, identitas budaya, politik serta energi. Kawasan ini juga berbatasan dengan lima kawasan antara lain Asia Tengah, Asia Timur, Balkan, Eropa Timur, dan Kaukasus. Ambisi Rusia untuk menjadi pemain global dikawasan tersebut sebagaimana China di kawasan Asia, Jerman di kawasan Uni Eropa, dan Amerika Serikat di kawasan Atlantik Utara.

Rusia menjadi aktor utama di kawasan tersebut dan menjadi salah satu fokus kebijakan luar negeri Rusia sejak era Uni Soviet. Kepentingan-kepentingan Rusia dikawasan Laut Hitam tidak terlepas dari beberapa keinginan Rusia untuk :

1. Mencegah munculnya koalisi militer yang anti-Rusia. Dalam hal ini supaya Rusia bisa bergabung ke dalam koalisi militer apa saja.
2. Mencegah akses negara-negara di kawasan Laut Hitam ke keanggotaan NATO. Karena Rusia ingin menjadi negara yang berpengaruh bagi negara-negara di kawasan Laut Hitam.
3. Memerangi dan menekan aksi separatisme, fundamentalisme, dan terorisme yang berada di negara Rusia.
4. Menghalangi integrasi negara-negara di kawasan Laut Hitam ke dalam Uni Eropa.

Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh *Stockholm International Peace Research Intitute* (SIPRI) yaitu lembaga internasional independen di Swediauntuk penelitian konflik, persenjataan, pengawasan senjata, dan pelucutan senjata, Rusia menghabiskan hampir US$ 72 miliar untuk belanja persenjataan pada tahun 2011. Laporan tersebut juga mencatat bahwa Rusia berencana melanjutkan kenaikan belanja militernya dengan rancangan kenaikan anggaran 55 % hingga 2014 (http://www.voa-islam.com, diakses pada 26 April 2018). Tujuan SIPRI sendiri adalah untuk memberikan data analisis dan rekomendasi berdasarkan sumber terbuka untuk pembuat kebijakan, peneliti, media, dan masyarakat yang tertarik.

Keinginan Rusia untuk memperluas pengaruhnya di negara-negara yang berbatasan dengan Laut Hitam, mengharuskan Rusia untuk membangun dan memodernisasi militer mereka. Awal mula kebangkitan kekuatan militer Rusia saat diangkatnya Vladimir Putin sebagai presiden mereka pada tahun 2000 hingga saat ini. Pada tahun 2009 Rusia mengeluarkan dana yang besar untuk meningkatkan kekuatan militer mereka, Rusia mengluarkan dana sebear 3,2 triliun rubel untuk pertahanan militer mereka yang setara dengan 4,5 % dari PDB Rusia. Jumlah tersebut naik dari 3,6 % dari PDB Rusia sejak Putin berkuasa.

Pada tahun 2012 Putin menjelaskan rencananya untuk menambah kekuatan militer Rusia secara besar-besaran, pada tahun 2017 rencana Putin tersebut tercapai. Putin mengalokasikan dana sebesar 23 triliun rubel (Rp 6,95 kuadriliun) dalam sepuluh tahun mendatang untuk mencapai keinginannya menambah kekuatan militer Rusia. Rencana program penambahan kekuatan militer tersebut meliputi penambahan lebih dari 400 rudal balistik anrtarbenua (ICMB), 2.300 tank, 8 kapal selam peluncur rudal balistik nuklir, 20 kapal selam serbu konvensional, lebih dari 50 kapal perang, dan lebih dari 600 pesawat tempur modern.

Angkatan bersenjata rusia akan membeli 1.000 helikopter, membentuk 28 resimen baru sistem rudal darat ke udara S-400, 38 divisi sistem pertahanan udara Vityaz, 10 bridge sistem rudal taktis Iskander-M, menambah sekitar 2.000 sistem artileri dan meriam berpenggerak aktif, dan lebih dari 17.000 kendaraan militer lain.Putin juga akan menigkatkan prestise angkatan bersenjata Rusia dengan menambah jumlah prajurit profesional hingga 70 persen dari total satu juta personel militer saat ini (https://nasional.kompas.com/, diakses pada 2 Mei 2018).

Sementara itu, kota Sevastopol yang berada di barat daya Krimea merupakan lokasi pangkalan militer Rusia (Armada Laut Hitam Rusia). Belasan ribu pasukan militer dan kapal perang Rusia berada di Krimea. Dengan penempatan militer Rusia di semenanjung tersebut membuat Rusia dengan teguh mempertahankan pangkalan militer mereka tersebut. Menurut Perjanjian Kharkiv tahun 2010 antara Rusia dan Ukraina tentang keberadaan Armada Laut Hitam Rusia di Ukraina, Rusia diperbolehkan Ukraina untuk menempatkan armada militernya di wilayah daratan dan kawasan perairan Ukraina kapanpun.

Perjanjian awal ditanda-tangani untuk periode lima tahun selanjutnya, kecuali salah satu pihak secara tertulis memberitahu pihak lain tentang keputusannya untuk mengakhiri perjanjian setahun sebelumnya. Rusia membayar sebesar US$ 98 juta pertahun kepada Ukraina untuk menyewa pangkalan angkatan laut di Krimea tersebut. Selain itu menurut Perjanjian Kharkiv, Rusia memberikan potongan harga penjualan gas kepada Ukraina sebesar US$ 100 per ton (https://id.rbth.com, diakses pada 1 Mei 2018). Keberanian Rusia bertindak jauh ke Krimea didorong oleh faktor strategis Ukraina bagi Rusia dan ambisi yang kuat Vladimir Putin untuk menunjukkan konfrontasinya dengan negara-negara Barat, yang dipandang elit rusia sebagai musuh dan hipokrit terhadap kepentingan Rusia.

1. Kepentingan Ekonomi

Pada awal masa kepemimpinan Presiden Rusia Vladimir Putin tahun 2000, politik luar negeri Rusia menjadi lebih ambisius berkat pertumbuhan kekuatan ekonomi dan konsentrasi kekuatan politik. Rusia ingin menunjukkan diri sebagai negara yang kuat terutama di kawasan negara-negara bekas pecahan Uni Soviet. Dengan menguasai Krimea Rusia akan dapat dengan mudah untuk mengambil langkah demi memenuhi kepentingan nasionalnya. Dengan bergabungnya Krimea menjadi bagian dari Rusia membuktikan bahwa pengaruh Rusia terhadap negara-negara bekas pecahan Uni Soviet sangat kuat.

Dengan demikian Rusia sangat menginginkan untuk menjadi negara yang sangat berpengaruh di dunia internasional. Tujuan dari negara yang berpangaruh di dunia tersebut adalah dengan memastikan keamanan yang berkelanjutan bagi Rusia sendiri, memperkuat kedaulatan dan integeritas teritorial, menjaga dan menigkatkan posisi yang kuat bagi Rusia dalam komunitas unternasional yang dapat mewujudkan kepentingan Rusia sebagai negara dengan kekuatan besar dan menjadi pusat yang paling berpengaruh dalam konsistensi hubungan internasional. Sebagai pewaris terbesar kejayaan Uni Soviet, Putin juga ingin mengembalikan kejayaan tersebut dalam tubuh Federasi Rusia, menjadi negara yang memiliki kekuatan besar.

Rusia menjadikan Krimea sebagai pangkalan militer dan armada laut mereka, tujuannya tidak semata-mata hanya untuk memantau negara sekutunya yang secara politik juga erat dengan negara-negara Barat, melainkan juga untuk memantau akses rute pipa gas yang mengalir dari dan menuju Rusia. Salah satu faktor pertumbuhan ekonomi Rusia yang cepat adalah dari ekspor minyak dan gas alam Rusia, yaitu jalur ekspor gas Rusia untuk Eropa melalui Ukraina tepatnya di Krimea. Sebagai salah satu negara pengekspor gas terbesar di dunia, letak geografis Krimea dan dengan kedekatannya dengan Rusia menjadikan Krimea sebagai wilayah transit utama bagi transportasi distribusi energi Rusia dalam perdagangan energinya ke negara-negara Eropa.

Pertumbuhan ekonomi Rusia didorong oleh ekspor energi, mengingat tingginya produksi minyak dan gas alam. Pendapatan minyak dan gas alam menyumbang 36% dari pendapatan anggaran Rusia pada tahun 2016. Rusia adalah produsen minyak bumi ketiga terbesar di dunia setelah Arab Saudi dan Amerika Serikat pada tahun 2016, dengan produksi rata-rata sebesar 11,2 juta barel per hari, dan Rusia adalah produsen gas alam kering terbesar kedua setelah Amerika Serikat, dengan hasil produksi 21 triliun kaki kubik (Tcf). Lebih dari sepertiga impor minyak mentah Rusia ke negara-negara Eropa di Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada tahun 2016, dan 70% impor gas alam Rusia ke negara-negara Eropa. Rusia bergantung pada Eropa sebagai pasar untuk penjualan minyak dan gas alam (https://www.eia.gov, diakses pada 8 Mei 2018).

**Kesimpulan**

Berdasarkan pembasahan yang telah dijabarkan di atas, maka alasan Rusia melakukan aneksasi dilatar-belakangi dengan berbagai kepentingan nasional Rusia itu sendiri. Berikut adalah beberapa kepentingan nasional Rusia:

1. Kepentingan melindungi keutuhan wilayah
2. Kepentingan budaya
3. Kepentingan militer
4. Kepentingan ekonomi

Dari keempat kepentingan nasional Rusia di Krimea, semua kepentingan Rusia sangat berhubungan satu sama lain. Dimana hanya tiga dari empat yang menjadi kepentingan utama, yaitu melindungi keutuhan wilayah, budaya, dan militer. Sedangkan kepentingan ekonomi hanyalah kepentingan pendukung dari aneksasi yang dilakukan Rusia di Krimea.Selain beberapa poin-poin tersebut, setelah melakukan penelitian mendalam penulis menemukan temuan penting, temuan penting tersebut antara lain bahwa Rusia ingin mengembalikan kejayaan seperti yang pernah dialami oleh Uni Soviet. Dengan membangun dan mempertahankan pangkalan militer mereka di Krimea, Rusia dapat mengawasi dan memberinkan pengaruhnya negara-negara bekas pecahan Uni Soviet, dengan begitu Rusia lebih mudah untuk mencapai keinginannya yaitu mengembalikan kejayaan mereka saat masih menjadi Uni Soviet.

**Daftar Pustaka**

Ambisi Presiden Rusia Vladimir Putin Menjadi Adi Kuasa, Pupus oleh Serangan Bom ISIS, terdapat di http://www.voaislam.com/read/intelligent/2015/11/09/40490/ambisi-presiden-rusia-vladimir-putin-menjadi-adi-kuasa-pupus-oleh-serangan-bom-isis/#sthash.90Z8xKLj.dpbs, diakses pada 26 April 2018.

Countries and Regions, tersedia di http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/, diakses pada tanggal 3 Meii 2018.

EIA : Country Analysis : Russia, terdapat di https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=RUS, diakses pada 8 Mei 2018.

Intervensi Ukraina Amerika Bekukan Ekonomi Rusia, terdapat di https://dunia.tempo.co/read/559320/intervensi-ukraina-amerika-bekukan-ekonomi-rusia, diakses pada 3 Mei 2018.

Lima Fakta Kunci Tentang Crimea, terdapat di https://www.antaranews.com/berita/422113/lima-fakta-kunci-tentang-krimea, diakses pada tanggal 8 Maret 2018

Pasukan Rusia Mengalir Masuk ke Crimea, terdapat di https://dunia.tempo.co/read/559100/pasukan-rusia-mengalir-masuk-ke-crimea, diakses pada 17 April 2018.

Putin : As Paksa Rusia Meningkatkan Kekuatan, terdapat di https://nasional.kompas.com/read/2012/02/21/07453730/putin.as.paksa.rusia.meningkatkan.kekuatan, diakses pada 2 Mei 2018.

Referendum Crimea Diikuti 1,5 Juta Pemilih, terdapat di https://dunia.tempo.co/read/562670/referendum-crimea-diikuti-15-juta-pemilih, diakses pada tanggal 15 April 2018.

Rusia Mulai Latihan di Crimea, terdapat di http://www.dw.com/id/rusia-mulai-latihan-perang-di-krimea/a-18247210, diakses pada tanggal 9 Maret 2018.

Sanksi Baru Terhadap Rusia Mulai Diterapkan, tersedia di http://www.dw.com/id/sanksi-baru-terhadap-rusia-mulai-diterapkan/a-17917673, diakses pada 3 Mei 2018.

Sevastopol di antara Rusia dan Ukraina : Dulu dan Kini, terdapat di https://id.rbth.com/politics/2014/03/06/sevastopol\_di\_antara\_rusia\_dan\_ukraina\_dulu\_dan\_kini\_23347, diakses pada 1 Mei 2018.

Tiga kali menggelar Referendum, keinginan rakyat Crimea tetap sama, terdapat di http://internasional.kompas.com/read/2014/03/17/1352226/Tiga.Kali.Gelar.Referendum.Keinginan.Rakyat.Crimea.Tetap.Sama, diakses pada tanggal 5 November 2017.

Ukraine's Yanukovych asked for troops, Russia tells UN, terdapat di http://www.bbc.com/news/world-europe-26427848, diakses pada tanggal 9 Maret 2018.

UN Security Council action on Crimea referendum blocked, terdapat di https://news.un.org/en/story/2014/03/464002-un-security-council-action-crimea-referendum-blocked, diakses pada 14 Maret 2018.

1. Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: irvands31@gmail.com [↑](#footnote-ref-2)